



PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16/PERMEN-KP/2014

TENTANG

PENGELOLAAN SATUAN KERJA INAKTIF
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan efektivitas penyusunan laporan keuangan, pengelolaan barang milik negara, dan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan yang disebabkan suatu satuan kerja dinyatakan Inaktif karena tidak dialokasikan anggaran dalam suatu tahun anggaran, perlu dibuat panduan dalam mengelola satuan kerja Inaktif tersebut di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pengelolaan Satuan Kerja Inaktif di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125);
11. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 126);
12. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 8/P Tahun 2014;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.05/2007 Tahun 2007 tentang Penyusunan Rencana Tindak dan Monitoring Tindak Lanjut Pemerintah terhadap Temuan Pemeriksaan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara, dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
17. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 100);
18. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 483);
19. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.05/2012 tentang Pelaksanaan Likuidasi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan pada Kementerian/ Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1278);
21. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16/PERMEN-KP/2013 tentang Pemindahtanganan Barang Milik Negara yang Berasal dari Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 899);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENGELOLAAN SATUAN KERJA INAKTIF DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Satuan kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit organisasi lini kementerian atau unit organisasi pemerintah daerah yang melaksanakan kegiatan kementerian dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.

2. Satuan ...

2. Satuan kerja inaktif yang selanjutnya disebut Satker Inaktif adalah satuan kerja yang tidak menerima alokasi anggaran dan/atau menerima kode satker berbeda pada suatu tahun anggaran, memiliki sejumlah aset dan kewajiban untuk menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan.
3. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat dengan PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian.
4. Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat PB adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang Kementerian.
5. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggungjawab penggunaan anggaran Kementerian.
6. Kuasa Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat KPB adalah pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang milik negara yang ada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
7. Kuasa khusus Kuasa Pengguna Anggaran/Barang satuan kerja inaktif yang selanjutnya disebut Kuasa Khusus Satker Inaktif adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri untuk menyusun laporan keuangan, mengelola barang milik negara, dan menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan dari satu atau lebih satuan kerja inaktif.
8. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat UAKPA adalah unit akuntansi instansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan tingkat satuan kerja.
9. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat UAKPB adalah satuan kerja/kuasa pengguna barang yang memiliki wewenang mengurus dan/atau menggunakan Barang Milik Negara.
10. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
11. Sistem Pengendalian Intern Kementerian yang selanjutnya disingkat SPIK adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
12. Rentang kendali adalah kemampuan manajemen untuk koordinasi secara efektif dan sangat tergantung pada banyaknya jumlah bawahan yang melaporkan dan menyampaikan pertanggungjawab kepadanya.
13. Penilaian risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran kementerian.
14. Kementerian adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan.
15. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Menteri ini adalah untuk memberikan panduan dalam mengisi pejabat yang menjalankan kuasa khusus untuk melaksanakan tugas dan fungsi laksana KPA dan KPB pada Satker Inaktif.

(2) Tujuan ...

- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Menteri ini dalam rangka implementasi SPIK guna terciptanya keandalan atas laporan keuangan dan pengamanan aset negara milik Kementerian.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mengatur mengenai Satker Inaktif yang terdiri dari perencanaan dan penetapan Satker Inaktif, Kuasa Khusus Satker Inaktif yang terdiri dari penetapan, tugas, wewenang, dan pembiayaan Kuasa Khusus Satker Inaktif, serta pelaksanaan tugas dan wewenang Kuasa Khusus Satker Inaktif.

BAB II
SATKER INAKTIF

Bagian Kesatu
Perencanaan Satker Inaktif

Pasal 4

Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian wajib:

- a. mengidentifikasi adanya Satker Inaktif di lingkungan kerja masing-masing setelah persetujuan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- b. menyusun daftar Satker Inaktif di lingkungan kerja masing-masing;
- c. mengajukan usulan Satker Inaktif kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal untuk ditetapkan;
- d. menyusun usulan pejabat yang akan menjadi Kuasa Khusus Satker Inaktif;
- e. mengajukan usulan Kuasa Khusus Satker Inaktif kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal untuk ditetapkan; dan
- f. menyusun rencana kerja dan mengalokasikan anggaran secara memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Kuasa Khusus Satker Inaktif yang teridentifikasi di lingkungan eselon I masing-masing.

Bagian Kedua
Penetapan Satker Inaktif

Pasal 5

- (1) Satker Inaktif sampai dengan 31 Desember 2013 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Sekretaris Jenderal atas nama Menteri diberikan wewenang untuk menetapkan Satker Inaktif pada tahun berjalan untuk periode berikutnya dengan Keputusan Menteri.

BAB III
KUASA KHUSUS SATKER INAKTIF

Bagian Kesatu
Penetapan Kuasa Khusus Satker Inaktif

Pasal 6

- (1) Dalam satu Eselon I ditunjuk satu Kuasa Khusus Satker Inaktif yang menangani satu dan atau lebih Satker Inaktif.
- (2) Penunjukkan lebih dari satu kuasa khusus pada satu Eselon I dapat dilakukan dengan pertimbangan rentang kendali dan penilaian risiko.

Pasal 7

- (1) Kuasa Khusus Satker Inaktif untuk Satker Inaktif sampai dengan 31 Desember 2013 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Sekretaris Jenderal atas nama Menteri diberikan wewenang untuk menetapkan Kuasa Khusus Satker Inaktif pada tahun berjalan untuk periode berikutnya dengan Keputusan Menteri berdasarkan usulan Pejabat Eselon I.
- (3) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terikat pada tahun anggaran dan dapat dilakukan perubahan sesuai dengan usulan serta berakhir jika seluruh aset dan kewajiban Satker Inaktif dinyatakan tuntas oleh Inspektur Jenderal dan siap diteruskan untuk dilakukan proses likuidasi entitas akuntansi.

Bagian Kedua
Tugas Kuasa Khusus Satker Inaktif

Pasal 8

Kuasa Khusus Satker Inaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) mempunyai tugas:

- a. menyiapkan rencana dan jadwal pelaksanaan sistem akuntansi instansi yang terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi BMN;
- b. mengoordinasi pelaksanaan Sistem Akuntansi Instansi;
- c. melakukan pencatatan dan inventarisasi BMN;
- d. menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan dan Laporan Barang KPB Semesteran/Tahunan;
- e. mengoordinasi pelaksanaan rekonsiliasi Laporan Keuangan dengan Pengelola Anggaran, baik KPPN maupun Kantor Wilayah DJPB;
- f. mengoordinasi pelaksanaan rekonsiliasi BMN dengan pihak Pengelola BMN, baik KPKNL maupun Kantor Wilayah DJKN;
- g. mengamankan BMN termasuk melengkapi bukti-bukti kepemilikan serta melakukan pemeliharaan BMN;
- h. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan BMN;
- i. melakukan identifikasi BMN yang tidak terkait dengan Tugas dan Fungsi Eselon I untuk dilakukan proses serah terima, baik dengan metoda transfer maupun hibah, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- j. menyelesaikan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) dan tindakan manajemen sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan;

k. menutup ...

- k. menutup rekening bendahara, rekening pengeluaran maupun rekening pendapatan
- l. menyiapkan usul dan saran proses likuidasi entitas akuntansi;
- m. melaksanakan tugas-tugas tambahan lain yang ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Ketiga
Wewenang Kuasa Khusus Satker Inaktif

Pasal 9

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kuasa Khusus Satker Inaktif berwenang:

- a. menunjuk dan menetapkan organisasi UAKPA/UAKPB;
- b. menunjuk dan menetapkan anggota dari berbagai direktorat teknis untuk membantu melaksanakan tugas dan wewenangnya;
- c. membentuk dan memimpin UAKPA untuk menyusun, menyajikan, dan menyampaikan Laporan Keuangan masing-masing Satker Inaktif secara periodik dan berjenjang;
- d. membentuk dan memimpin UAKPB untuk mengelola BMN sejak perencanaan kebutuhan/penganggaran, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, serta pembinaan, pengawasan, dan pengendalian;
- e. mengoordinasi pelaksanaan Sistem Akuntansi Instansi;
- f. menandatangani dan menyampaikan Laporan Keuangan Satker Inaktif;
- g. mengajukan permohonan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan BMN;
- h. menggunakan BMN untuk kepentingan kementerian;
- i. mengajukan usulan pemindahtanganan dan penghapusan BMN;
- j. membentuk tim *ad-hoc* penyelesaian kerugian negara dan melaporkan hasilnya kepada Tim Penyelesaian Kerugian Negara;
- k. menagih dan menyetorkan kewajiban tuntutan ganti kerugian negara kepada pihak yang diwajibkan untuk mengganti sesuai keputusan Menteri;
- l. menyelenggarakan diskusi penyelesaian manajerial atas rekomendasi hasil pemeriksaan; dan
- m. mengajukan usul penuntasan dan penutupan Satker Inaktif atau likuidasi entitas akuntansi kepada Menteri setelah dilakukan audit oleh Tim dari Inspektorat Jenderal.

Bagian Keempat
Pembiayaan Kuasa Khusus Satker Inaktif

Pasal 10

- (1) Pembiayaan Kuasa Khusus Satker Inaktif dilekatkan pada Satker yang memiliki Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dan mengikuti tata cara pelaksanaan dan pertanggungjawaban pada Satker tersebut.
- (2) Dukungan pembiayaan tidak dapat dijadikan hambatan langsung dalam kelancaran pengelolaan Satker Inaktif

BAB IV
PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG
KUASA KHUSUS SATKER INAKTIF

Pasal 11

Kuasa Khusus Satker Inaktif menjalankan tugas dan wewenangnya di bawah pengendalian Pejabat eselon I masing-masing, berkoordinasi dan dibina oleh Sekretaris Jenderal, serta mendapat pengawasan dari Inspektorat Jenderal.

Pasal 12

Dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Kuasa khusus Satker Inaktif berpedoman pada peraturan tentang tata cara penyusunan laporan keuangan, tata cara pengelolaan BMN, tata cara penyelesaian hasil pemeriksaan, tata cara pelaksanaan likuidasi entitas akuntansi dan entitas pelaporan, dan peraturan perundang-undangan lain yang ditetapkan pejabat yang berwenang.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 April 2014

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 April 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 452

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Hanung Cahyono

LAMPIRAN I
 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN
 PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 16/PERMEN-KP/2014
 TENTANG PENGELOLAAN SATUAN KERJA INAKTIF DI
 LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

SATKER INAKTIF PADA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2013

SATKER INAKTIF			AKUN BARANG MILIK NEGARA												
Eselon I	Kode Satker	Nama Satker	Aset Lancar Selain Persediaan	Persediaan	Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Aset Tetap Lainnya	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Penyusutan Aset Tetap	Aset Tak Berwujud	Aset Lainnya (Aset Henti Guna)	Penyusutan Aset Lainnya	Grand Total
DKI JAKARTA															
03206	03206015208TP	Dinas Peternakan, Perikanan, dan Kelautan Kota Jakarta Utara	-	-	-	253,820,000	-	-	-	-	(149,770,876)	-	-	-	104,049,124
03207	03207015208TP	Dinas Peternakan, Perikanan, dan Kelautan Kota Jakarta Utara	-	-	-	172,511,000	-	-	-	-	(167,191,714)	-	-	-	5,319,286
03207	03207015605TP	Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kepulauan Seribu	-	-	-	80,705,000	-	-	-	-	(80,705,000)	-	-	-	-
Total DKI JAKARTA			-	-	-	507,036,000	-	-	-	-	(397,667,590)	-	-	-	109,368,410
INSTANSI KANTOR PUSAT															
03203	03203498856KP	PMU Promosi Perikanan Berkelanjutan	-	-	1,641,074,787	581,970,143	30,318,475,069	71,864,829,616	-	-	(17,139,971,081)	-	-	-	87,266,378,534
03204	03204445387KP	Pengembangan Kawasan Perikanan Budidaya Pusat	-	34,100,000	-	1,532,459,700	346,227,100	-	-	-	(1,379,835,413)	-	-	-	532,951,387
03207	03207465202KP	Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (MCRMP)	-	-	-	18,896,828,131	8,368,425,921	-	-	-	(15,062,903,820)	-	-	-	12,202,350,232
Total INSTANSI KANTOR PUSAT			-	34,100,000	1,641,074,787	21,011,257,974	39,033,128,090	71,864,829,616	-	-	(33,582,710,314)	-	-	-	100,001,680,153
PROVINSI JAWA BARAT															
03203	03203021621TP	DKP Kabupaten Ciamis	-	-	-	-	-	5,804,430,320	-	-	(2,031,550,612)	-	-	-	3,772,879,708
03203	03203025311TP	DKP Kabupaten Sukabumi	-	-	-	14,993,000	-	12,260,349,000	-	-	(4,594,410,475)	-	-	-	7,680,931,525
03203	03203025449TP	DKP Kota Cirebon	-	-	-	-	-	1,748,500,000	-	-	(244,790,000)	-	-	-	1,503,710,000
03206	03206026024TP	Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kota Tasikmalaya	-	-	-	3,316,000	-	-	194,165,000	-	(2,487,000)	-	-	-	194,994,000
03206	03206029481TP	Dinas Kelautan dan Ketahanan Pangan Kota Bandung	-	-	-	441,598,480	3,231,174,992	-	-	-	(323,032,823)	-	-	-	3,349,740,649
03206	03206890742KD	PPN Pelabuhan Ratu	-	-	-	-	3,591,987,000	-	-	-	(329,551,050)	-	-	-	3,262,435,950
03207	03207020831TP	Dinas Peternakan, Perikanan, dan Kelautan Kabupaten Bekasi	-	-	-	106,948,000	-	-	-	-	(106,948,000)	-	-	-	-
03207	03207021621TP	DKP Kabupaten Ciamis	-	-	-	36,839,000	202,001,000	-	-	-	(55,019,090)	-	88,377,500	(74,584,340)	197,614,070
Total JAWA BARAT			-	-	-	603,694,480	7,025,162,992	19,813,279,320	194,165,000	-	(7,687,789,050)	-	88,377,500	(74,584,340)	19,962,305,902

SATKER INAKTIF			AKUN BARANG MILIK NEGARA												
Eselon I	Kode Satker	Nama Satker	Aset Lancar Selain Persediaan	Persediaan	Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Aset Tetap Lainnya	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Penyusutan Aset Tetap	Aset Tak Berwujud	Aset Lainnya (Aset Henti Guna)	Penyusutan Aset Lainnya	Grand Total
PROVINSI JAWA TENGAH															
03201	03201030747TP	Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan Kabupaten Tegal	-	-	-	25,025,000	-	-	-	-	(25,025,000)	-	-	-	-
03206	03206030313TP	DKP Kabupaten Demak	-	-	-	262,902,000	1,491,043,000	-	-	-	(272,362,909)	-	-	-	1,481,582,091
03206	03206031212TP	DKP Kabupaten Jepara	-	-	-	300,815,000	576,230,000	-	74,700,000	-	(253,183,463)	-	-	-	698,561,537
03206	03206032511TP	Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Boyolali	-	-	-	257,493,750	-	12,696,750	294,114,000	-	(151,092,426)	-	-	-	413,212,074
03206	03206035410TP	Dinas Kelautan dan Pertanian Kota Tegal	-	-	-	303,641,600	1,277,671,000	129,003,000	-	-	(317,728,515)	-	-	-	1,392,587,085
03206	03206890733KD	PPS Cilacap	-	-	-	544,081,600	246,335,000	-	-	-	(511,843,590)	-	-	-	278,573,010
03207	03207030245TP	Dinas Peternakan, Kelautan, dan Perikanan Kab. Kendal	-	-	-	-	-	-	-	-	(34,711,715)	-	-	-	(34,711,715)
03207	03207030633TP	DKP Kabupaten Balang	-	-	-	502,137,278	148,754,600	240,124,400	-	-	(524,467,179)	-	37,379,100	(24,029,424)	379,898,775
03207	03207031630TP	DKP Kabupaten Cilacap	-	-	-	82,868,316	-	-	-	-	(82,868,316)	-	-	-	-
03207	03207032243TP	DKP Kabupaten Purworejo	-	-	-	121,308,000	-	-	-	-	(116,908,000)	-	-	-	4,400,000
03207	03207032333TP	Dinas Peternakan, Perikanan, dan Kelautan Kab. Kebumen	-	-	-	122,580,500	-	-	-	-	(115,171,788)	-	-	-	7,408,712
Total PROVINSI JAWA TENGAH			-	-	-	2,522,853,044	3,740,033,600	381,824,150	368,814,000	-	(2,405,362,901)	-	37,379,100	(24,029,424)	4,621,511,569
PROVINSI D.I. YOGYAKARTA															
03207	03207040328TP	DKP Kabupaten Gunung Kidul	-	-	-	109,949,000	-	-	-	-	(105,844,142)	-	-	-	4,104,858
03207	03207040441TP	Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan Kab. Kulonprogo	-	-	-	141,210,000	-	-	-	-	(137,067,142)	-	-	-	4,142,858
Total D.I. YOGYAKARTA			-	-	-	251,159,000	-	-	-	-	(242,911,284)	-	-	-	8,247,716
PROVINSI JAWA TIMUR															
03203	03203050513TP	Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan Kabupaten Sampang	-	-	-	-	-	-	-	978,536,000	-	-	-	-	978,536,000
03206	03206050734TP	DKP Kabupaten Sumenep	-	-	-	634,989,500	-	-	-	-	(204,980,089)	-	-	-	430,009,411
03206	03206051147TP	DKP Kabupaten Banyuwangi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	260,222,000	(227,694,250)	32,527,750
03206	03206051312TP	DKP Kabupaten Malang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	244,337,484	(178,625,647)	65,711,837
03206	03206055735TP	Dinas Pertanian Kota Kediri	-	-	-	1,765,000	-	-	-	-	(1,103,125)	-	-	-	661,875
03207	03207050318TP	DKP Kabupaten Sidoarjo	-	-	-	77,666,000	-	-	-	-	(77,666,000)	-	-	-	-
03207	03207051213TP	DKP Kabupaten Jember	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122,875,500	(115,725,501)	7,149,999
03207	03207052029TP	DKP Kabupaten Trenggalek	-	-	-	87,882,000	-	-	-	-	(83,639,142)	-	45,366,000	(45,366,000)	4,242,858
03207	03207052253TP	DKP Kabupaten Madiun	-	-	-	29,750,000	-	-	-	-	(24,482,143)	-	-	-	5,267,857
03207	03207052540TP	DKP Kabupaten Ponorogo	-	-	-	29,800,000	-	-	-	-	(25,542,858)	-	-	-	4,257,142
03207	03207055530TP	DKP Kota Probolinggo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,100,000	(9,064,286)	5,035,714
Total JAWA TIMUR			-	-	-	861,852,500	-	-	-	978,536,000	(417,413,357)	-	686,900,984	(576,475,684)	1,533,400,443
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM															
03203	03203060514TP	DKP Kabupaten Aceh Selatan	-	-	-	19,900,000	1,285,703,200	174,509,850	-	-	(97,508,204)	-	1,907,300,000	-	3,289,904,846
03203	03203061206TP	DKP Kabupaten Aceh Barat Daya	3,861,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,861,300
03203	03203061409TP	DKP Kabupaten Aceh Jaya	-	-	-	-	1,671,693,000	-	-	-	(83,584,650)	-	-	-	1,588,108,350
03207	03207060912TP	DKP Kabupaten Simeuleu	-	-	-	335,511,000	168,397,000	96,422,700	-	-	(257,046,516)	-	-	-	343,284,184
03207	03207065113TP	DKP Kota Banda Aceh	-	-	-	135,846,000	-	-	-	-	(130,529,572)	-	-	-	5,316,428
03207	03207065309TP	DKP Kota Langsa	-	-	-	115,152,996	-	-	20,000,000	-	(115,152,996)	-	-	-	20,000,000

SATKER INAKTIF			AKUN BARANG MILIK NEGARA												
Eselon I	Kode Satker	Nama Satker	Aset Lancar Selain Persediaan	Persediaan	Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Aset Tetap Lainnya	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Penyusutan Aset Tetap	Aset Tak Berwujud	Aset Lainnya (Aset Henti Guna)	Penyusutan Aset Lainnya	Grand Total
03207	03207065407TP	DKP Kota Lhokseumawe	-	-	-	128,042,000	-	-	-	-	(122,725,572)	-	-	-	5,316,428
Total NANGGROE ACEH DARUSSALAM			3,861,300	-	-	734,451,996	3,125,793,200	270,932,550	20,000,000	-	(806,547,510)	-	1,907,300,000	-	5,255,791,536
PROVINSI SUMATERA UTARA															
03203	03203070536TP	Dinas Perikanan Dan Peternakan Kabupaten Simalungun	-	-	-	-	1,356,300,000	-	-	-	(13,563,000)	-	-	-	1,342,737,000
03203	03203075163TP	DKP Kota Medan	1,100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,100,000
03203	03203075610TP	DKP Kota Sibolga	-	-	-	-	1,266,042,000	-	-	-	(12,660,420)	-	-	-	1,253,381,580
03206	03206072030TP	Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Serdang Bedagai	-	-	-	6,567,000	-	-	-	-	(6,208,800)	-	798,760,000	(238,101,825)	561,016,375
03206	03206075537TP	Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Tanjung Balai	-	-	-	4,175,000	-	-	-	-	(4,175,000)	-	-	-	-
03207	03207070044TP	Dinas Perikanan dan Kelautan Prov. Sumatera Utara (Coremap)	-	-	-	1,758,353,000	-	221,100,000	-	-	(1,518,910,508)	-	-	-	460,542,492
03207	03207070048TP	BAPPEDA Prov. Sumatera Utara (MCRMP)	-	-	-	1,025,359,000	-	-	-	-	(822,854,835)	-	-	-	202,504,165
03207	03207070137TP	BAPPEDA Kab. Deli Serdang (MCRMP)	-	-	-	15,774,000	-	-	-	-	(15,774,000)	-	-	-	-
03207	03207070309TP	DKP Kabupaten Langkat (MCRMP)	-	-	-	234,114,000	-	-	470,000,000	-	(218,136,634)	-	-	-	485,977,366
03207	03207070427TP	DKP Kabupaten Tapanuli Tengah (Coremap)	-	-	-	1,445,291,900	492,812,000	758,836,000	2,500,000	-	(1,371,304,057)	-	-	-	1,328,135,843
03207	03207070941TP	DKP Kabupaten Tapanuli Selatan	-	-	-	78,645,000	-	-	-	-	(76,618,144)	-	-	-	2,026,856
03207	03207071028TP	DKP Kabupaten Asahan (MCRMP)	-	-	-	240,798,000	-	-	-	-	(240,798,000)	-	-	-	-
03207	03207071110TP	DKP Kabupaten Nias (Coremap)	-	-	-	1,042,026,250	-	-	43,900,000	-	(975,832,140)	-	-	-	110,094,110
03207	03207071336TP	DKP Kabupaten Mandailing Natal	-	-	-	80,950,000	-	-	-	-	(80,950,000)	-	-	-	-
03207	03207071410TP	DKP Kabupaten Nias Selatan (Coremap)	-	-	-	1,129,230,195	316,400,040	146,926,000	1,508,700	-	(1,224,002,649)	-	-	-	370,062,286
03207	03207072004TP	DKP Kabupaten Serdang Bedagai	-	-	-	101,202,000	-	-	-	-	(96,927,714)	-	-	-	4,274,286
03207	03207075156TP	DKP Kota Medan	-	-	-	52,178,000	-	-	34,231,000	-	(52,178,000)	-	-	-	34,231,000
03207	03207075607TP	DKP Kabupaten Sibolga	-	-	-	29,401,000	-	-	-	-	(24,257,786)	-	-	-	5,143,214
Total SUMATERA UTARA			1,100,000	-	-	7,244,064,345	3,431,554,040	1,126,862,000	552,139,700	-	(6,755,151,687)	-	798,760,000	(238,101,825)	6,161,226,573
PROVINSI SUMATERA BARAT															
03203	03203081210TP	DKP Kab. Pasaman Barat	-	-	-	412,500,000	1,176,316,643	224,850,357	-	-	(257,022,737)	-	-	-	1,556,644,263
03207	03207080066TP	DKP Prov. Sumatera Barat (Coremap)	-	-	-	378,630,000	-	-	-	-	(371,510,711)	-	32,573,000	(32,573,000)	7,119,289
03207	03207080069TP	BAPPEDA Prov. Sumatera Barat (MCRMP)	-	-	-	816,971,300	-	-	-	-	(684,374,157)	-	-	-	132,597,143
03207	03207080134TP	DKP Kabupaten Agam	-	-	-	97,759,000	-	-	-	-	(97,759,000)	-	-	-	-
03207	03207080310TP	DKP Kabupaten Lima Puluh Kota	-	-	-	29,903,000	58,566,000	-	-	-	(32,183,640)	-	-	-	56,285,360
03207	03207080509TP	DKP Kabupaten Padang Pariaman (MCRMP)	-	-	-	194,271,000	-	-	-	-	(193,813,668)	-	-	-	457,332
03207	03207080550TP	DKP Kabupaten Padang Pariaman	-	-	-	44,485,000	134,650,000	-	9,650,000	-	(49,784,014)	-	-	-	139,000,986
03207	03207080607TP	DKP Kabupaten Pesisir Selatan (MCRMP)	-	-	-	184,006,000	-	-	-	-	(183,818,500)	-	-	-	187,500
03207	03207080635TP	DKP Kabupaten Pesisir Selatan	-	-	-	666,110,510	782,333,750	407,083,000	-	-	(952,932,901)	-	53,010,500	(35,274,580)	920,330,279
03207	03207080733TP	Dinas Pertanian Kab. Tanah Datar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93,882,566	(16,194,609)	77,687,957

SATKER INAKTIF			AKUN BARANG MILIK NEGARA												
Eselon I	Kode Satker	Nama Satker	Aset Lancar Selain Persediaan	Persediaan	Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Aset Tetap Lainnya	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Penyusutan Aset Tetap	Aset Tak Berwujud	Aset Lainnya (Aset Henti Guna)	Penyusutan Aset Lainnya	Grand Total
03207	03207080914TP	Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Kepulauan Mentawai (Coremap)	-	-	-	2,322,117,473	1,088,207,037	1,858,025,727	-	-	(2,782,282,119)	-	132,589,000	(132,589,000)	2,486,068,118
03207	03207081210TP	DKP Kabupaten Pasaman Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	128,109,000	(36,555,340)	91,553,660
03207	03207085547TP	Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Padang	-	-	-	350,330,000	-	-	-	-	(292,149,647)	-	-	-	58,180,353
03207	03207085714TP	DKP Kota Pariaman	-	-	-	129,823,200	493,013,000	-	-	-	(191,387,319)	-	-	-	431,448,881
Total SUMATERA BARAT			-	-	-	5,626,906,483	3,733,086,430	2,489,959,084	9,650,000	-	(6,089,018,413)	-	440,164,066	(253,186,529)	5,957,561,121
PROVINSI RIAU															
03207	03207090069TP	BAPPEDA Prov. Riau (MCRMP)	-	-	-	329,661,000	-	-	-	-	(329,661,000)	134,870,000	-	-	134,870,000
03207	03207090246TP	DKP Kabupaten Bengkalis	-	-	-	248,475,000	-	-	-	-	(237,953,226)	-	-	-	10,521,774
03207	03207090517TP	DKP Kabupaten Indragiri Hilir	-	-	-	107,500,000	79,425,000	-	-	-	(110,879,608)	-	-	-	76,045,392
03207	03207090535TP	DKP Kabupaten Indragiri Hilir (MCRMP)	-	-	-	381,523,050	-	-	-	-	(336,256,382)	-	-	-	45,266,668
03207	03207090819TP	DKP Kabupaten Rokan Hilir	-	-	-	46,700,000	-	-	-	-	(40,857,858)	-	-	-	5,842,142
03207	03207095333TP	DKP Kota Dumai	-	-	-	81,000,000	-	-	-	-	(81,000,000)	-	-	-	-
Total RIAU			-	-	-	1,194,859,050	79,425,000	-	-	-	(1,136,608,074)	134,870,000	-	-	272,545,976
PROVINSI JAMBI															
03203	03203100546TP	DKP Kabupaten Kerinci	-	-	-	-	220,623,858	998,372,142	-	-	(50,204,347)	-	-	-	1,168,791,653
03203	03203100723TP	DKP Kabupaten Tanjabtim	-	-	-	560,438,000	3,111,754,572	2,096,210,352	-	-	(1,397,239,942)	-	-	-	4,371,162,982
03207	03207100064TP	BAPPEDA Prov. Jambi (MCRMP)	-	-	-	1,311,343,990	-	-	-	-	(1,311,343,990)	-	-	-	-
03207	03207100209TP	DKP Kabupaten Tanjung Jabung Barat	-	-	-	197,174,000	-	-	-	-	(190,591,136)	-	-	-	6,582,864
03207	03207100232TP	DKP Kabupaten Tanjab Barat (MCRMP)	-	-	-	202,782,000	-	-	-	-	(202,771,650)	-	-	-	10,350
03207	03207100629TP	Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Peternakan, dan Perikanan Kab. Merangin	-	-	-	29,000,000	-	-	-	-	(23,964,286)	-	-	-	5,035,714
03207	03207100712TP	DKP Kabupaten Tanjung Jabung Timur (MCRMP)	-	-	-	147,083,708	-	-	-	-	(147,083,708)	-	-	-	-
03207	03207100723TP	DKP Kabupaten Tanjung Jabung Timur	-	-	-	89,565,000	75,952,500	-	50,600,000	-	(97,919,775)	-	-	-	118,197,725
Total JAMBI			-	-	-	2,537,386,698	3,408,330,930	3,094,582,494	50,600,000	-	(3,421,118,834)	-	-	-	5,669,781,288
PROVINSI SUMATERA SELATAN															
03203	03203110351TP	Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin	-	-	-	-	1,393,670,000	-	-	-	(13,936,700)	-	-	-	1,379,733,300
03203	03203110813TP	DKP Kabupaten Ogan Komering Ilir	-	-	-	-	1,621,791,000	-	-	-	(145,961,190)	-	-	-	1,475,829,810
03203	03203119036TP	DKP Prov. Sumatera Selatan (TP)	-	-	-	-	369,453,486	1,898,463,000	-	-	(1,084,794,534)	-	-	-	1,183,121,952
03207	03207110813TP	DKP Kabupaten Ogan Komering Ilir	-	-	-	129,507,000	-	-	-	-	(124,373,072)	-	-	-	5,133,928
03207	03207110932TP	DKP Kabupaten Banyuasin	-	-	-	29,150,000	-	-	-	-	(25,100,000)	-	-	-	4,050,000
03207	03207115147TP	DKP Kota Palembang	-	-	-	80,700,000	-	-	-	-	(80,700,000)	-	-	-	-
Total SUMATERA SELATAN			-	-	-	239,357,000	3,384,914,486	1,898,463,000	-	-	(1,474,865,496)	-	-	-	4,047,868,990

SATKER INAKTIF			AKUN BARANG MILIK NEGARA												
Eselon I	Kode Satker	Nama Satker	Aset Lancar Selain Persediaan	Persediaan	Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Aset Tetap Lainnya	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Penyusutan Aset Tetap	Aset Tak Berwujud	Aset Lainnya (Aset Henti Guna)	Penyusutan Aset Lainnya	Grand Total
PROVINSI LAMPUNG															
03203	03203120453TP	DKP Kabupaten Lampung Barat	-	-	-	-	-	-	-	10,403,806,600	-	-	-	-	10,403,806,600
03206	03206120906TP	DKP Kabupaten Pesawaran	-	-	-	251,500,000	357,240,000	-	-	-	(608,740,000)	-	-	-	-
03207	03207120430TP	DKP Kabupaten Lampung Barat	-	-	-	202,607,000	391,110,000	79,820,000	-	-	(187,388,313)	-	-	-	486,148,687
03207	03207120705TP	DKP Kabupaten Lampung Timur	-	-	-	30,000,000	-	-	-	-	(24,642,858)	-	-	-	5,357,142
03207	03207120906TP	DKP Kabupaten Pesawaran	-	-	-	29,850,000	-	-	-	-	(25,592,858)	-	-	-	4,257,142
Total LAMPUNG			-	-	-	513,957,000	748,350,000	79,820,000	-	10,403,806,600	(846,364,029)	-	-	-	10,899,569,571
PROVINSI KALIMANTAN BARAT															
03201	03201135150TP	DKP Kota Pontianak	-	-	-	25,700,000	-	-	-	-	(25,700,000)	-	-	-	-
03203	03203130416TP	DKP Kabupaten Pontianak	-	88,000	-	24,700,000	2,734,694,000	-	-	-	(216,128,580)	-	-	-	2,543,353,420
03203	03203130652TP	DKP Kabupaten Ketapang	-	-	-	-	1,470,537,000	-	-	-	(44,116,110)	-	-	-	1,426,420,890
03203	03203135144TP	DKP Kota Pontianak	293,000	-	-	-	3,984,989,000	5,274,056,000	-	-	(2,679,037,714)	-	-	-	6,580,300,286
03204	03204130449TP	DKP Kabupaten Pontianak	-	-	-	29,800,000	-	-	-	-	(29,800,000)	-	-	-	-
03204	03204130652TP	DKP Kabupaten Ketapang	-	-	-	-	-	5,808,888,000	-	-	(813,244,320)	-	-	-	4,995,643,680
03204	03204135144TP	DKP Kota Pontianak - Wirausaha	-	-	-	17,900,000	-	-	-	-	(15,662,500)	-	-	-	2,237,500
03206	03206130546TP	Dinas Perikanan Kab. Kapuas Hulu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	245,950,000	(57,388,334)	188,561,666
03207	03207130057TP	BAPPEDA Prov. Kalimantan Barat (MCRMP)	-	-	-	1,360,445,050	-	-	-	-	(1,258,610,494)	-	-	-	101,834,556
03207	03207130110TP	DKP Kabupaten Sambas	-	-	-	110,800,000	-	-	-	-	(105,514,286)	-	-	-	5,285,714
03207	03207130429TP	BAPPEDA Kab. Pontianak (MCRMP)	-	-	-	236,852,000	-	-	-	-	(218,370,350)	-	-	-	18,481,650
03207	03207130546TP	Dinas Perikanan Kab. Kapuas Hulu	-	-	-	144,580,000	385,460,000	107,400,000	-	-	(223,545,550)	-	-	-	413,894,450
03207	03207130630TP	BAPPEDA Kabupaten Ketapang (MCRMP)	-	-	-	393,554,000	-	-	-	-	(393,554,000)	-	-	-	-
03207	03207130652TP	DKP Kabupaten Ketapang	-	-	-	151,980,000	-	-	-	-	(147,694,286)	-	-	-	4,285,714
03207	03207130736TP	DKP Kabupaten Bengkayang	-	-	-	466,000,000	624,188,000	305,000,000	-	-	(726,909,450)	-	-	-	668,278,550
Total KALIMANTAN BARAT			293,000	88,000	-	2,962,311,050	9,199,868,000	11,495,344,000	-	-	(6,897,887,640)	-	245,950,000	(57,388,334)	16,948,578,076
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH															
03203	03203140115TP	DKP Kabupaten Kapuas	-	-	-	-	-	-	-	3,977,782,000	-	-	-	-	3,977,782,000
03203	03203140544TP	DKP Kabupaten Kotawaringin Barat	-	1,439,802,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,439,802,000
03206	03206145154TP	Dinas Pertanian, Perikanan, dan Peternakan Kota Palangkaraya	-	-	-	212,108,000	-	-	-	-	(203,508,628)	-	-	-	8,599,372
03207	03207140068TP	BAPPEDA Prov. Kalimantan Tengah (MCRMP)	-	-	-	852,079,000	-	-	-	-	(850,721,125)	-	-	-	1,357,875
03207	03207140115TP	Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Kapuas (MCRMP)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	221,897,000	(182,768,650)	39,128,350
03207	03207140514TP	Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Kotawaringin Barat (MCRMP)	-	-	-	280,646,000	-	-	-	-	(240,256,867)	-	-	-	40,389,133
03207	03207140544TP	DKP Kabupaten Kotawaringin Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,575,000	(145,039,658)	5,535,342
03207	03207140608TP	DKP Kabupaten Katingan	-	-	-	29,458,300	-	-	-	-	(24,241,050)	-	-	-	5,217,250
03207	03207141111TP	DKP Kabupaten Pulang Pisau	-	-	-	108,660,455	-	-	-	-	(103,303,313)	-	-	-	5,357,142
03207	03207141404TP	BAPPEDA Kab. Kotawaringin Timur	-	-	-	149,159,000	-	-	125,350,000	-	(147,886,300)	-	-	-	126,622,700
Total KALIMANTAN TENGAH			-	1,439,802,000	-	1,632,110,755	-	-	125,350,000	3,977,782,000	(1,569,917,283)	-	372,472,000	(327,808,308)	5,649,791,164

SATKER INAKTIF			AKUN BARANG MILIK NEGARA												
Eselon I	Kode Satker	Nama Satker	Aset Lancar Selain Persediaan	Persediaan	Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Aset Tetap Lainnya	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Penyusutan Aset Tetap	Aset Tak Berwujud	Aset Lainnya (Aset Henti Guna)	Penyusutan Aset Lainnya	Grand Total
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN															
03203	03203150652TP	Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Barito Kuala	-	-	-	96,305,000	4,760,122,000	-	-	-	(104,557,940)	-	-	-	4,751,869,060
03203	03203151033TP	DKP Kab. Tanah Bumbu	-	-	-	-	1,322,747,000	-	-	-	(79,364,820)	-	-	-	1,243,382,180
03206	03206150746TP	TP KAB. TABALONG	-	-	-	-	2,165,771,000	-	-	-	(170,812,550)	-	-	-	1,994,958,450
03206	03206151029TP	TP KAB. TANAH BUMBU	-	-	-	881,080,475	1,421,438,525	158,877,000	-	-	(771,663,153)	-	-	-	1,689,732,847
03207	03207150811TP	DKP Kabupaten Kota Baru	-	-	-	682,516,000	232,720,000	43,443,500	-	-	(613,521,604)	-	-	-	345,157,896
03207	03207151029TP	DKP Kabupaten Tanah Bumbu	-	-	-	29,900,000	-	-	-	-	(25,614,286)	-	-	-	4,285,714
03207	03207155152TP	DKP Kota Banjarmasin	-	-	-	29,597,000	-	-	-	-	(24,300,214)	-	-	-	5,296,786
Total KALIMANTAN SELATAN			-	-	-	1,719,398,475	9,902,798,525	202,320,500	-	-	(1,789,834,567)	-	-	-	10,034,682,933
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR															
03203	03203160531TP	DKP Kabupaten Nunukan	-	-	-	-	-	2,229,774,000	-	-	(1,226,375,700)	-	-	-	1,003,398,300
03206	03206169234TP	Dinas Perikanan dan Peternakan Kota Samarinda	-	-	-	607,770,300	1,231,766,300	-	22,881,700	-	(404,823,942)	-	46,350,000	(28,040,625)	1,475,903,733
03207	03207160060TP	BAPPEDA Prov. Kalimantan Timur (MCRMP)	-	-	-	561,732,500	-	-	-	-	(485,097,263)	-	-	-	76,635,237
03207	03207160442TP	Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Berau	-	-	-	661,530,000	800,810,000	227,727,000	28,800,000	-	(717,837,388)	-	-	-	1,001,029,612
03207	03207160531TP	DKP Kabupaten Nunukan	-	-	-	167,780,724	49,171,112	-	25,154,174	-	(158,007,496)	-	-	-	84,098,514
03207	03207160920TP	DKP Kabupaten Penajam Paser Utara	-	-	-	29,040,000	-	-	-	-	(23,744,286)	-	-	-	5,295,714
03207	03207161020TP	DKP Kabupaten Kutai Kertanegara	-	-	-	104,707,000	86,940,000	-	-	-	(108,694,508)	-	-	-	82,952,492
Total KALIMANTAN TIMUR			-	-	-	2,132,560,524	2,168,687,412	2,457,501,000	76,835,874	-	(3,124,580,583)	-	46,350,000	(28,040,625)	3,729,313,602
PROVINSI SULAWESI UTARA															
03203	03203170206TP	DKP Kabupaten Minahasa	-	997,007,000	-	23,276,000	751,137,000	-	-	-	(55,926,505)	-	-	-	1,715,493,495
03203	03203170638TP	DKP Kabupaten Minahasa Selatan	-	-	3,619,993,000	255,456,424	3,946,362,500	5,883,519,000	-	-	(1,355,578,119)	-	-	-	12,349,752,805
03203	03203171214TP	DKP Kabupaten Kepulauan Sitaro	-	2,818,525,000	-	-	-	2,611,651,000	-	-	(26,116,510)	-	-	-	5,404,059,490
03203	03203179078TP	DKP Kabupaten Minahasa Utara	-	-	-	-	-	-	1,943,100,000	-	-	-	-	-	1,943,100,000
03204	03204175311TP	DKP Kot Bitung	-	-	-	14,500,000	-	-	-	-	(7,249,999)	-	-	-	7,250,001
03206	03206170639TP	DKP Kabupaten Minahasa Selatan	(39,420,000)	-	-	275,344,374	90,000,000	55,000,000	-	-	(212,522,132)	-	-	-	168,402,242
03206	03206179271TP	DKP Kabupaten Minahasa Utara	-	-	-	374,958,000	647,475,000	-	-	-	(212,353,181)	-	-	-	810,079,819
03207	03207170075TP	BAPPEDA Prov. Sulawesi Utara (MCRMP)	-	-	-	128,740,000	-	-	-	-	(128,740,000)	-	-	-	-
03207	03207170309TP	DKP Kabupaten Bolaang Mongondow (MCRMP)	-	-	-	287,675,000	-	-	-	-	(287,675,000)	-	-	-	-
03207	03207170354TP	DKP Kabupaten Bolaang Mongondow	-	-	-	89,550,000	268,280,000	12,520,000	3,000,000	-	(101,980,550)	-	-	-	271,369,450
03207	03207170512TP	DKP Kabupaten Kepulauan Talaud	-	-	-	41,000,000	-	-	40,000,000	-	(41,000,000)	-	-	-	40,000,000
03207	03207170624TP	DKP Kabupaten Minahasa Selatan	-	-	-	426,043,500	768,088,000	101,553,500	-	-	(479,320,342)	-	-	-	816,364,658
03207	03207170811TP	DKP Kabupaten Minahasa Utara	-	-	-	30,000,000	-	-	-	-	(24,642,858)	-	-	-	5,357,142
03207	03207171005TP	DKP Kabupaten Minahasa Tenggara	-	-	-	14,987,000	-	-	-	-	(5,352,500)	-	-	-	9,634,500
03207	03207175146TP	DKP Kota Manado	-	-	-	29,490,000	-	-	-	-	(24,078,393)	-	-	-	5,411,607
03207	03207175336TP	BAPPEDA Kota Bitung (MCRMP)	-	-	-	345,666,000	-	-	-	-	(345,448,500)	5,450,000	-	-	5,667,500
Total SULAWESI UTARA			(39,420,000)	3,815,532,000	3,619,993,000	2,336,686,298	6,471,342,500	8,664,243,500	1,986,100,000	-	(3,307,984,589)	5,450,000	-	-	23,551,942,709

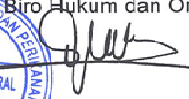

SATKER INAKTIF			AKUN BARANG MILIK NEGARA												
Eselon I	Kode Satker	Nama Satker	Aset Lancar Selain Persediaan	Persediaan	Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Aset Tetap Lainnya	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Penyusutan Aset Tetap	Aset Tak Berwujud	Aset Lainnya (Aset Henti Guna)	Penyusutan Aset Lainnya	Grand Total
PROVINSI SULAWESI TENGAH															
3203	03203180542TP	DKP Kab. Buol	-	-	-	10,000,000	-	-	-	-	(6,250,000)	-	-	-	3,750,000
3203	03203180938TP	DKP Kabupaten Tojo Una-una	-	-	-	-	178,250,000	999,222,000	-	-	(465,692,400)	-	-	-	711,779,600
03206	03206180433TP	DKP Kabupaten Banggai	-	-	-	1,401,280,000	1,045,009,000	-	-	-	(825,556,453)	-	116,440,000	(66,355,000)	1,670,817,547
03207	03207180059TP	BAPPEDA Prov. Sulawesi Tengah (MCRMP)	-	-	-	850,518,500	-	-	-	-	(664,070,498)	-	-	-	186,448,002
03207	03207180148TP	DKP Kabupaten Poso	-	-	-	288,421,000	-	-	-	-	(279,443,553)	-	-	-	8,977,447
03207	03207180213TP	DKP Kabupaten Donggala (MCRMP)	-	-	-	158,889,486	-	-	14,323,070	-	(155,847,184)	-	-	-	17,365,372
03207	03207180238TP	DKP Kabupaten Donggala	-	-	-	29,075,000	-	-	-	-	(24,048,214)	-	-	-	5,026,786
03207	03207180433TP	DKP Kabupaten Banggai	-	-	-	436,112,034	-	-	-	-	(330,670,340)	-	-	-	105,441,694
03207	03207180738TP	DKP Kabupaten Banggai Kepulauan	-	-	-	287,952,500	411,690,000	-	-	-	(224,669,438)	-	-	-	474,973,062
03207	03207180813TP	Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Parigi Moutong (MCRMP)	-	-	-	377,979,500	-	-	-	-	(326,096,166)	-	-	-	51,883,334
03207	03207180929TP	DKP Kabupaten Tojo Una-Una	-	-	-	115,850,000	-	-	-	-	(111,607,142)	-	-	-	4,242,858
Total SULAWESI TENGAH			-	-	-	3,956,078,020	1,634,949,000	999,222,000	14,323,070	-	(3,413,951,388)	-	116,440,000	(66,355,000)	3,240,705,702
PROVINSI SULAWESI SELATAN															
03203	03203191039TP	DKP Kabupaten Sinjai	-	-	-	14,000,000	8,183,238,000	-	-	-	(134,849,640)	-	-	-	8,062,388,360
03203	03203191221TP	DKP Kabupaten Bantaeng	-	-	-	-	-	2,904,244,000	-	-	(87,127,320)	-	-	-	2,817,116,680
03203	03203191435TP	DKP Kabupaten Selayar	-	2,488,794,500	-	89,689,000	1,143,375,000	-	-	-	(92,439,804)	-	-	-	3,629,418,696
03203	03203191843TP	DKP Kabupaten Pangkajene Kepulauan	-	4,205,544,000	-	-	1,994,450,000	-	-	-	(139,611,500)	-	-	-	6,060,382,500
03203	03203195145TP	DKP Kota Makassar	-	2,538,707,000	-	-	-	1,702,542,000	-	-	(766,143,900)	-	-	-	3,475,105,100
03203	03203195224TP	DKP Kota Pare-pare	-	-	-	576,300,000	1,409,917,000	-	-	-	(355,193,360)	-	-	-	1,631,023,640
03206	03206195145TP	DKP Kota Makassar	-	-	-	769,080,254	-	69,701,746	-	-	(517,762,754)	-	-	-	321,019,246
03207	03207190046TP	Dinas Perikanan dan Kelautan Prov. Sulsel (Coremap)	-	-	-	509,540,000	-	-	-	-	(501,980,357)	-	104,000,000	(104,000,000)	7,559,643
03207	03207190048TP	BAPPEDA Prov. Sulsel (MCRMP)	-	-	-	910,594,000	-	-	-	-	(909,820,563)	-	-	-	773,437
03207	03207190328TP	DKP Kabupaten Wajo	-	-	-	30,000,000	-	-	-	-	(24,642,858)	-	-	-	5,357,142
03207	03207190734TP	BAPPEDA Kab. Maros (MCRMP)	-	-	-	49,000,000	-	-	-	-	(49,000,000)	-	-	-	-
03207	03207191221TP	DKP Kabupaten Bantaeng	-	-	-	106,820,000	-	-	-	-	(101,691,428)	-	-	-	5,128,572
03207	03207191409TP	DKP Kabupaten Selayar (Coremap)	-	-	-	2,832,175,500	507,956,000	87,760,000	-	-	(1,867,626,487)	-	98,055,000	(75,855,036)	1,582,464,977
03207	03207191529TP	DKP Kabupaten Takalar	-	-	-	299,050,000	-	-	-	-	(299,050,000)	-	-	-	-
03207	03207191728TP	DKP Kabupaten Sidenreng Rappang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,360,000	(24,231,428)	5,128,572
03207	03207191836TP	DKP Kabupaten Pangkajene Kepulauan (MCRMP)	-	-	-	201,857,000	-	-	-	-	(193,050,700)	-	-	-	8,806,300
03207	03207191843TP	DKP Kabupaten Pangkajene Kepulauan (Coremap)	-	-	-	3,975,488,179	586,880,000	-	2,000,000	-	(2,251,406,909)	8,050,000	149,104,200	(131,589,360)	2,338,526,110
Total SULAWESI SELATAN			-	9,233,045,500	-	10,363,593,933	13,825,816,000	4,764,247,746	2,000,000	-	(8,291,397,580)	8,050,000	380,519,200	(335,675,824)	29,950,198,975
PROVINSI SULAWESI TENGGARA															
03203	03203200212TP	DKP Kabupaten Buton	-	-	-	1,019,000,000	7,739,763,000	1,739,473,000	-	-	(1,055,518,000)	-	-	-	9,442,718,000
03203	03203200531TP	DKP Kabupaten KonaweSelatan	-	-	-	-	-	1,493,608,000	-	-	(672,123,600)	-	-	-	821,484,400
03203	03203205227TP	DKP Kota Bau-Bau	-	411,300,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	411,300,000
03206	03206200212TP	TP KAB. BUTON	-	-	-	13,000,000	-	-	-	-	(8,125,000)	-	-	-	4,875,000
03206	03206205126TP	TP KOTA KENDARI	-	-	-	825,449,848	113,150,000	254,997,152	-	-	(560,836,605)	-	-	-	632,760,395

SATKER INAKTIF			AKUN BARANG MILIK NEGARA												
Eselon I	Kode Satker	Nama Satker	Aset Lancar Selain Persediaan	Persediaan	Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Aset Tetap Lainnya	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Penyusutan Aset Tetap	Aset Tak Berwujud	Aset Lainnya (Aset Henti Guna)	Penyusutan Aset Lainnya	Grand Total
03206	03206205218TP	TP KOTA BAU-BAU	-	-	-	278,374,000	531,219,000	-	-	-	(224,581,510)	-	-	-	585,011,490
03207	03207200064TP	Dinas Perikanan dan Kelautan Prov. Sultra (Coremap)	-	-	-	403,262,000	-	-	31,450,000	-	(363,467,500)	-	92,960,000	(92,960,000)	71,244,500
03207	03207200065TP	BAPPEDA Prov. Sultra (MCRMP)	-	-	-	997,081,000	-	-	-	-	(905,952,566)	-	-	-	91,128,434
03207	03207200135TP	BAPPEDA Kab. Kendari (Konawe) (MCRMP)	-	-	-	175,527,000	-	-	-	-	(145,387,549)	-	-	-	30,139,451
03207	03207200212TP	DKP Kabupaten Buton	-	-	-	602,812,300	259,423,108	-	-	-	(486,011,794)	-	-	-	376,223,614
03207	03207200240TP	DKP Kabupaten Buton (Coremap)	-	-	-	3,254,671,900	-	327,014,960	9,600,000	-	(2,468,639,673)	-	-	-	1,122,647,187
03207	03207200241TP	BAPPEDA Kab. Buton (MCRMP)	-	-	-	166,431,000	-	-	-	-	(146,037,000)	-	-	-	20,394,000
03207	03207200311TP	DKP Kabupaten Muna	-	-	-	876,199,660	453,440,000	111,818,000	-	-	(843,346,373)	-	-	-	598,111,287
03207	03207200531TP	DKP Kabupaten Konawe Selatan	-	-	-	29,900,000	-	-	-	-	(24,578,572)	-	-	-	5,321,428
03207	03207200708TP	DKP Kabupaten Wakatobi (Coremap)	-	-	-	3,810,520,076	211,152,000	-	11,850,000	-	(2,599,034,525)	-	-	-	1,434,487,551
03207	03207200709TP	DKP Kabupaten Wakatobi	-	-	-	29,997,000	-	-	-	-	(24,104,143)	-	-	-	5,892,857
03207	03207200920TP	DKP Kabupaten Konawe	-	-	-	85,441,000	-	-	-	-	(85,441,000)	-	-	-	-
03207	03207201002TP	DKP Kabupaten Konawe Utara	-	-	-	14,870,000	-	-	-	-	(12,745,715)	-	-	-	2,124,285
Total SULAWESI TENGGARA			-	411,300,000	-	12,582,536,784	9,308,147,108	3,926,911,112	52,900,000	-	(10,625,931,125)	-	92,960,000	(92,960,000)	15,655,863,879
PROVINSI MALUKU															
03203	03203210525TP	DKP Kabupaten Kepulauan Aru	18,375,000	18,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,375,000
03203	03203210622TP	DKP Kabupaten Seram Bag. Barat	-	-	-	1,403,500,000	-	-	-	-	(42,105,000)	-	-	-	1,361,395,000
03206	03206210227TP	DKP Kabupaten Maluku Tenggara	-	-	-	357,266,000	-	-	-	-	(17,863,300)	-	-	-	339,402,700
03206	03206210316TP	DKP Kabupaten Maluku Tenggara Barat	-	-	-	293,094,000	-	-	-	-	(14,654,700)	-	-	-	278,439,300
03207	03207210151TP	DKP Kabupaten Maluku Tengah	-	-	-	114,634,000	-	-	-	-	(109,294,714)	-	-	-	5,339,286
03207	03207210316TP	DKP Kabupaten Maluku Tenggara Barat	-	-	-	96,158,000	-	-	-	-	(96,158,000)	-	-	-	-
03207	03207210414TP	DKP Kabupaten Pulau Buru	-	-	-	78,308,000	-	-	-	-	(74,022,286)	-	-	-	4,285,714
03207	03207210518TP	DKP Kabupaten Kepulauan Aru	-	-	-	113,500,000	-	-	-	-	(108,142,858)	-	-	-	5,357,142
03207	03207210708TP	DKP Kabupaten Seram Bagian Timur	-	-	-	113,300,000	-	-	-	-	(107,942,858)	-	-	-	5,357,142
Total MALUKU			18,375,000	18,000,000	-	515,900,000	2,053,860,000	-	-	-	(570,183,716)	-	-	-	2,035,951,284
PROVINSI BALI															
03206	03206220755TP	Dinas Peternakan, Perikanan, dan Kelautan Kabupaten Badung	-	-	-	824,055,000	74,732,000	149,994,000	-	-	(794,338,855)	-	-	-	254,442,145
03207	03207220441TP	Dinas Peternakan, Perikanan, dan Kelautan Kabupaten Gianyar	-	-	-	38,921,000	-	-	-	-	(33,886,714)	-	-	-	5,034,286
03207	03207220708TP	Dinas Peternakan, Perikanan, dan Kelautan Kabupaten Badung	-	-	-	10,000,000	-	-	-	-	(10,000,000)	-	-	-	-
Total BALI			-	-	-	872,976,000	74,732,000	149,994,000	-	-	(838,225,569)	-	-	-	259,476,431

SATKER INAKTIF			AKUN BARANG MILIK NEGARA												
Eselon I	Kode Satker	Nama Satker	Aset Lancar Selain Persediaan	Persediaan	Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Aset Tetap Lainnya	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Penyusutan Aset Tetap	Aset Tak Berwujud	Aset Lainnya (Aset Henti Guna)	Penyusutan Aset Lainnya	Grand Total
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT															
03203	03203230418TP	DKP Kabupaten Bima	-	-	409,848,658		381,531,842	2,870,667,500	-	-	(853,671,915)	-			2,808,376,085
03206	03206230614TP	DKP Kabupaten Dompu	-	-		298,326,250	591,204,200	26,966,550	-	-	(194,095,540)	-			722,401,460
03206	03206230711TP	DKP Kabupaten Sumbawa Barat	-	-		275,377,500	668,737,000	85,844,240	-	-	(253,600,144)	-			776,358,596
03207	03207230070TP	BAPPEDA Prov. Nusa Tenggara Barat (MCRMP)	-	-		829,029,500			-	-	(685,840,896)	-			143,188,604
03207	03207230114TP	DKP Kabupaten Lombok Barat (MCRMP)	-	-		235,417,000			-	-	(234,682,200)	-			734,800
03207	03207230544TP	BAPPEDA Kab. Sumbawa (MCRMP)	-	-		236,664,000			-	-	(232,429,332)	-			4,234,668
03207	03207230614TP	DKP Kabupaten Dompu	-	-		1,300,000			-	-	(1,300,000)	-			-
Total NUSA TENGGARA BARAT			-	-	409,848,658	1,876,114,250	1,641,473,042	2,983,478,290	-	-	(2,455,620,027)	-	-	-	4,455,294,213
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR															
03203	03203240345TP	DKP Kabupaten Timor Tengah Utara	-	-		12,350,000	804,443,000		-	-	(47,940,900)	-			768,852,100
03203	03203240812TP	DKP Kabupaten Ende	-	1,421,396,000					-	-	-	-			1,421,396,000
03203	03203241360TP	DKP Kabupaten Lembata	-	144,000					-	-	-	-			144,000
03203	03203241407TP	DKP Kabupaten Rote Ndao	-	496,513,000					-	-	-	-			496,513,000
03203	03203242011TP	DKP Kabupaten Manggarai Timur	-	2,594,000,000					-	-	-	-			2,594,000,000
03207	03207240066TP	Dinas Perikanan dan Kelautan Prov. NTT (Coremap)	-	-		417,100,000			-	-	(412,614,875)	-			4,485,125
03207	03207240076TP	BAPPEDA Prov. Nusa Tenggara Timur (MCRMP)	-	-		599,427,500			173,000,000	-	(575,651,768)	-			196,775,732
03207	03207240138TP	BAPPEDA Kab. Kupang (MCRMP)	-	-		145,475,000			-	-	(145,250,000)	-			225,000
03207	03207240252TP	DKP Kabupaten Belu	-	-		52,650,000			27,350,000	-	(52,650,000)	-			27,350,000
03207	03207240334TP	BAPPEDA Kab. Timor Tengah Utara	-	-		168,330,000			-	-	(168,330,000)	46,028,617			46,028,617
03207	03207240626TP	DKP Kabupaten Sikka (Coremap)	-	-		2,373,495,748	412,618,821		-	-	(1,913,862,205)	-			872,252,364
03207	03207240723TP	DKP Kabupaten Flores Timur	-	-		29,950,000			-	-	(14,700,894)	-			15,249,106
03207	03207241304TP	DKP Kabupaten Lembata	-	-		29,810,000			-	-	(14,638,840)	-			15,171,160
03207	03207245131TP	BAPPEDA Kota Kupang (MCRMP)	-	-		302,935,500			-	-	(296,813,483)	79,239,000			85,361,017
Total NUSA TENGGARA TIMUR			-	4,512,053,000	-	4,131,523,748	1,217,061,821	-	200,350,000	-	(3,642,452,965)	125,267,617	-	-	6,543,803,221
PROVINSI PAPUA															
03203	03203250210TP	DKP KP Kab. Biak	-	-			638,743,000		-	-	-	-			638,743,000
03203	03203250711TP	DKP Kabupaten Merauke	-	250,000	1,945,277,000	213,595,000	18,181,748,800	14,371,471,000	-	-	(6,758,013,840)	-			27,954,327,960
03203	03203251319TP	DKP Kabupaten Mappi	-	-			3,869,950,000		-	-	(46,239,800)	-			3,823,710,200
03203	03203251410TP	DKP Kabupaten Asmat	-	1,452,900,000					-	-	-	-			1,452,900,000
03206	03206255142TP	DKP Kota Jayapura	-	-		6,500,000			-	-	(6,500,000)	-	596,942,000	(349,389,207)	247,552,793
03207	03207250069TP	Dinas Perikanan dan Kelautan Prov. Papua (Coremap)	-	-		258,370,000			-	-	(245,018,143)	-			13,351,857
03207	03207250107TP	DKP Kabupaten Jayapura	-	-		122,476,725			-	-	(117,300,297)	-			5,176,428
03207	03207250210TP	DKP Kabupaten Biak Numfor	-	-		30,000,000			-	-	(24,642,858)	73,600,000			78,957,142
03207	03207250221TP	BP3D Kab. Biak Numfor (Coremap)	-	-		3,920,971,618	216,250,000		-	12,020,000	(3,003,780,625)	-			1,145,460,993
03207	03207252315TP	DKP Kabupaten Waropen	-	-		85,950,000			-	-	(85,950,000)	-			-
03207	03207255142TP	DKP Kota Jayapura	-	-		30,000,000			-	-	(25,714,286)	-			4,285,714
Total PAPUA			-	1,453,150,000	1,945,277,000	4,667,863,343	22,906,691,800	14,371,471,000	12,020,000	-	(10,313,159,849)	73,600,000	596,942,000	(349,389,207)	35,364,466,087

SATKER INAKTIF			AKUN BARANG MILIK NEGARA												
Eselon I	Kode Satker	Nama Satker	Aset Lancar Selain Persediaan	Persediaan	Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Aset Tetap Lainnya	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Penyusutan Aset Tetap	Aset Tak Berwujud	Aset Lainnya (Aset Henti Guna)	Penyusutan Aset Lainnya	Grand Total
PROVINSI BENGKULU															
03206	03206265147TP	DKP Kota Bengkulu	-	-	-	41,571,000	-	-	-	-	(31,161,843)	-	536,256,200	(271,238,073)	275,427,284
03207	03207260063TP	BAPPEDA Prov. Bengkulu (MCRMP)	-	-	-	760,136,800	-	-	-	-	(760,136,800)	-	-	-	-
03207	03207260105TP	DKP Kabupaten Bengkulu Utara	-	-	-	76,757,000	-	-	-	-	(76,757,000)	-	-	-	-
03207	03207260129TP	BAPPEDA Kab. Bengkulu Utara (MCRMP)	-	-	-	34,355,000	-	-	-	-	(34,344,150)	-	-	-	10,850
03207	03207260411TP	DKP Kabupaten Seluma	-	-	-	114,574,600	-	-	-	-	(109,002,426)	-	-	-	5,572,174
03207	03207260519TP	DKP Kabupaten Kaur	-	-	-	110,325,000	-	-	-	-	(104,985,714)	-	-	-	5,339,286
03207	03207260618TP	Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan Kabupaten Muko-Muko	-	-	-	102,335,000	-	-	-	-	(95,736,788)	-	-	-	6,598,212
03207	03207265147TP	DKP Kota Bengkulu	-	-	-	129,346,000	-	-	-	-	(125,396,000)	-	-	-	3,950,000
Total BENGKULU			-	-	-	1,369,400,400	-	-	-	-	(1,337,520,721)	-	536,256,200	(271,238,073)	296,897,806
PROVINSI MALUKU UTARA															
03203	03203280049DK	DKP Provinsi Maluku Utara	5,700,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,700,000
03207	03207280310TP	DKP Kabupaten Halmahera Utara	-	-	-	111,000,000	-	-	-	-	(105,428,571)	-	-	-	5,571,429
03207	03207280418TP	DKP Kabupaten Halmahera Selatan	-	-	-	30,000,000	-	-	-	-	(24,642,858)	-	-	-	5,357,142
03207	03207280718TP	DKP Kabupaten Halmahera Barat	-	-	-	30,000,000	-	-	-	-	(25,714,286)	-	-	-	4,285,714
Total MALUKU UTARA			5,700,000	-	-	171,000,000	-	-	-	-	(155,785,715)	-	-	-	20,914,285
PROVINSI BANTEN															
03201	03201290261TP	DKP Kabupaten Pandeglang	-	-	-	7,280,000	-	-	18,500,000	-	(7,280,000)	-	-	-	18,500,000
03203	03203290146TP	Dinas Kelautan, Perikanan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kab.Serang	5,380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,380
03203	03203290266TP	DKP Kabupaten Pandeglang	1,788	1,394,570,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,394,571,788
03203	03203290358TP	DKP Kabupaten Lebak	-	-	-	2,484,800,000	-	3,368,965,000	-	-	(2,319,131,562)	-	-	-	3,534,633,438
03206	03206290126TP	DKP Kabupaten Serang	-	-	-	7,600,000	-	-	-	-	(6,340,000)	-	-	-	1,260,000
03207	03207290126TP	DKP Kabupaten Serang	-	-	-	81,000,000	-	-	-	-	(81,000,000)	-	-	-	-
03207	03207290212TP	DKP Kabupaten Pandeglang	-	-	-	107,050,000	-	-	-	-	(96,139,285)	-	-	-	10,910,715
Total BANTEN			7,168	1,394,570,000	-	2,687,730,000	-	3,368,965,000	18,500,000	-	(2,509,890,847)	-	-	-	4,959,881,321
PROVINSI BANGKA BELITUNG															
03206	03206305134TP	DKP Kota Pangkalpinang	-	-	-	256,939,925	-	-	-	-	(130,259,216)	-	-	-	126,680,709
03207	03207300312TP	DKP Kabupaten Bangka Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123,913,000	(119,868,142)	4,044,858
03207	03207300421TP	DKP Kabupaten Bangka Tengah	-	-	-	29,293,500	-	-	-	-	(24,177,964)	-	-	-	5,115,536
03207	03207300506TP	DKP Kabupaten Bangka Selatan	-	-	-	28,420,850	-	-	-	-	(23,413,403)	-	-	-	5,007,447
03207	03207300610TP	DKP Kabupaten Belitung Timur	-	-	-	84,612,500	-	-	-	-	(84,612,500)	-	-	-	-
Total BANGKA BELITUNG			-	-	-	399,266,775	-	-	-	-	(262,463,083)	-	123,913,000	(119,868,142)	140,848,550
PROVINSI GORONTALO															
03206	03206319193TP	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan Kota Gorontalo	-	-	-	144,235,620	-	73,724,000	-	-	(124,211,583)	-	581,668,572	(312,732,902)	362,683,707
03207	03207310054TP	BAPPEDA Prov. Gorontalo (MCRMP)	-	-	-	444,041,150	-	-	15,364,000	-	(435,716,035)	403,382,105	-	-	427,071,220
03207	03207310128TP	DKP Kabupaten Gorontalo	-	-	-	97,946,000	-	-	-	-	(97,946,000)	-	-	-	-
03207	03207310215TP	BAPPEDA Kab. Boalemo	-	-	-	197,431,000	-	-	-	-	(193,646,036)	-	-	-	3,784,964
03207	03207310330TP	DKP Kabupaten Pohuwato	-	-	-	30,000,000	-	-	-	-	(14,732,144)	-	-	-	15,267,856

SATKER INAKTIF			AKUN BARANG MILIK NEGARA												
Eselon I	Kode Satker	Nama Satker	Aset Lancar Selain Persediaan	Persediaan	Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Aset Tetap Lainnya	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Penyusutan Aset Tetap	Aset Tak Berwujud	Aset Lainnya (Aset Henti Guna)	Penyusutan Aset Lainnya	Grand Total
03207	03207310411TP	DKP Kabupaten Bone Bolango	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	833,045,500	(371,944,872)	461,100,628
03207	03207310706TP	DKP Kabupaten Gorontalo Utara	-	-	-	29,520,000	-	-	-	-	(24,237,358)	-	-	-	5,282,642
03207	03207315119TP	DKP Kota Gorontalo	-	-	-	97,647,000	-	-	-	-	(97,647,000)	-	-	-	-
Total GORONTALO			-	-	-	1,040,820,770	-	73,724,000	15,364,000	-	(988,136,156)	403,382,105	1,414,714,072	(684,677,774)	1,275,191,017
PROVINSI KEPULAUAN RIAU															
03206	03206320218TP	DKP Kabupaten Karimun	-	-	-	320,862,200	490,705,000	-	-	-	(164,712,720)	-	-	-	646,854,480
03206	03206329046TP	DKP Kabupaten Bintan	-	-	-	32,560,000	-	-	-	-	(29,389,250)	-	1,000,628,100	(415,109,919)	588,688,931
03207	03207320029TP	Dinas Perikanan dan Kelautan Prov. Kepulauan Riau (Coremap)	-	-	-	631,504,755	-	-	-	-	(595,444,862)	-	-	-	36,059,893
03207	03207320125TP	DKP Kabupaten Bintan	-	-	-	30,000,000	-	-	-	-	(25,714,286)	-	-	-	4,285,714
03207	03207320126TP	DKP Kabupaten Bintan (Coremap)	-	-	-	1,896,810,276	901,806,000	2,285,042,994	64,250,000	-	(1,895,757,716)	-	-	-	3,252,151,554
03207	03207320218TP	DKP Kabupaten Karimun	-	-	-	96,000,000	-	-	-	-	(96,000,000)	-	-	-	-
03207	03207320312TP	DKP Kabupaten Natuna (Coremap)	-	-	-	1,657,703,800	1,247,155,200	1,633,518,143	12,000,000	-	(2,023,029,647)	-	-	-	2,527,347,496
03207	03207320411TP	Dinas Sumberdaya Alam Kab. Lingga (Coremap)	-	-	-	1,299,229,000	-	244,985,000	-	-	(1,094,282,386)	-	-	-	449,931,614
03207	03207325113TP	DKP Kota Batam (Coremap)	-	-	-	1,863,453,747	1,260,950,327	2,611,936,930	-	-	(2,200,321,036)	-	221,005,263	(211,067,761)	3,545,957,470
03207	03207325123TP	DKP Kota Batam	-	-	-	29,800,000	-	-	-	-	(24,442,858)	-	-	-	5,357,142
Total KEPULAUAN RIAU			-	-	-	7,857,923,778	3,900,616,527	6,775,483,067	76,250,000	-	(8,149,094,761)	-	1,221,633,363	(626,177,680)	11,056,634,294
PROVINSI PAPUA BARAT															
03203	03203330167TP	DKP Kabupaten Manokwari	39,657,386	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,657,386
03207	03207330036TP	Dinas Perikanan dan Kelautan Prov. Papua Barat (Coremap)	-	-	-	298,360,000	-	-	-	-	(263,345,715)	-	-	-	35,014,285
03207	03207330149TP	DKP Kabupaten Manokwari	-	-	-	77,919,000	-	-	-	-	(77,919,000)	-	-	-	-
03207	03207330246TP	DKP Kabupaten Sorong	-	-	-	617,023,220	833,375,000	-	-	-	(574,086,941)	-	-	-	876,311,279
03207	03207330308TP	DKP Kabupaten Fak-Fak	-	-	-	30,000,000	-	-	-	-	(24,642,858)	-	-	-	5,357,142
03207	03207330410TP	DKP Kabupaten Sorong Selatan	-	-	-	82,900,000	-	-	-	-	(78,614,286)	-	-	-	4,285,714
03207	03207330516TP	Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Raja Ampat (Coremap)	-	-	-	2,175,714,000	139,640,000	1,492,541,818	-	-	(2,201,783,937)	-	61,780,000	(61,780,000)	1,606,111,881
Total PAPUA BARAT			39,657,386	-	-	3,281,916,220	973,015,000	1,492,541,818	-	-	(3,220,392,737)	-	61,780,000	(61,780,000)	2,566,737,687
PROVINSI SULAWESI BARAT															
03203	03203340329TP	Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Mamuju Utara	79,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79,500
03206	03206340225TP	DKP Kabupaten Mamuju	-	-	-	582,889,000	-	-	-	-	(300,603,276)	-	-	-	282,285,724
03207	03207340225TP	DKP Kabupaten Mamuju	-	-	-	111,558,500	-	-	-	-	(107,441,358)	-	-	-	4,117,142
03207	03207340431TP	DKP Kabupaten Polewali Mandar	-	-	-	30,000,000	-	-	-	-	(25,714,286)	-	-	-	4,285,714
Total SULAWESI BARAT			79,500	-	-	724,447,500	-	-	-	-	(433,758,920)	-	-	-	290,768,080
TOTAL SATKER IN AKTIF KKP			29,653,354	22,311,640,500	7,616,193,445	111,130,994,193	152,988,837,503	162,745,999,247	3,775,361,644	15,360,124,600	(139,161,698,360)	750,619,722	9,168,811,485	(4,187,736,769)	342,528,800,564

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

 Hanung Cahyono


MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16/PERMEN-KP/2014
TENTANG
PENGELOLAAN SATUAN KERJA INAKTIF DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN
PERIKANAN

KUASA KHUSUS SATKER INAKTIF
UNTUK SATKER IN-AKTIF SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2013

NO.	UNIT KERJA ESELON I PENANGGUNG JAWAB SATKER INAKTIF	KUASA KHUSUS SATKER INAKTIF
1.	Sekretariat Jenderal	Kepala Biro Perencanaan
2.	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
3.	Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya	Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya
4.	Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Sekretaris Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
5.	Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Sekretaris Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

SHARIF C. SUTARDJO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Hanung Cahyono